

ISBN : 978-602-73463-2-1

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**PENYULUHAN,
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
[Semnas PKP-PM]**

2 MEI 2019



KERJASAMA



Syiah 1980

mandiri
syariah



Diterbitkan Oleh :

Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

KAJIAN PEMBERDAYAAN KEPALA KELUARGA (KK) RENTAN PADA PROGRAM *DEEPENING RESILIENCE* OLEH LSM JEMARI SAKATO DI NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM

Mega Sri Wardani^{1*}, Ferdhinal Asful¹, Nuraini Budi Astuti¹

¹Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Padang, Sumatera Barat

*Email: megasriw99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KK rentan serta mendeskripsikan persepsi KK rentan tentang penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mewawancarai informan kunci dan beberapa responden yang dipilih secara sengaja (*purposive*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan ini telah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan dan 85% KK yang diberdayakan telah mengalami peningkatan dari rentan menjadi tangguh. Dari persepsi responden, prinsip pemberdayaan sudah diterapkan sebesar 85,58% dengan rincian: prinsip kesukarelaan terpenuhi 94,23%, prinsip partisipatif terpenuhi dengan persentase paling besar yaitu 96,15%, prinsip keswadayaan terpenuhi 82,69% dan prinsip kebersamaan dengan persentase yang paling kecil dibandingkan dengan prinsip lainnya yaitu 69,23%.

Kata kunci: pemberdayaan, kesukarelaan, partisipatif, keswadayaan, kebersamaan

A. Pendahuluan

Shardlow (2005) dalam Rifa'i (2013) menjelaskan pengertian pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya individu, kelompok maupun komunitas dalam berusaha mengontrol kehidupan mereka dan mengusahakan untuk membentuk masa depan mereka sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, gagasan ini mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong seseorang untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah yang dihadapi, sehingga seseorang tersebut mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya. Azwar (2014) menjelaskan

bahwa konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan untuk mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat *bottom up* yang melibatkan peran masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang artinya, dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi berbagai bidang yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Kemiskinan menjadi objek yang mendasari kegiatan pemberdayaan. Menurut Howard Jones (1990:281) dalam Suharto (2009:8) tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dan berbagai manifestasinya. Hal ini menekankan bahwa masalah kemiskinan di sini tidak hanya merujuk kepada kemiskinan fisik, melainkan juga secara nonfisik.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin adalah kegiatan pemberdayaan KK rentan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. KK rentan yang dimaksudkan adalah KK yang berada pada kondisi miskin serta memenuhi kriteria keluarga rentan yang ditetapkan oleh penyelenggara kegiatan. Melalui kegiatan pemberdayaan KK rentan ini diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat dari kondisi rentan menjadi tangguh, baik secara fisik dan nonfisik. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi alat atau sarana yang dapat merubah masyarakat KK rentan menjadi KK tangguh.

Kegiatan pemberdayaan KK rentan ini merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan yang ada dalam rangkaian program *Deepening Resilience* yang dilaksanakan oleh LSM Jemari Sakato. LSM Jemari Sakato, dalam program ini, bekerja sama dengan NGO internasional yaitu OXFAM dan *Australian Aid*. Program *Deepening Resilience* ini menyentuh 3 tingkatan, yaitu tingkatan komunitas, tingkatan UMKM dan tingkatan pemerintah yang telah selesai dijalankan selama kurun waktu 4 tahun (2014-2017). Untuk kegiatan pemberdayaan KK rentan sendiri merupakan kegiatan program ditingkatkan komunitas yang dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017.

Program pendampingan KK rentan menjadi KK tangguh yang dilakukan oleh LSM Jemari Sakato telah dilaksanakan selama 3 tahun, yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2016 dan dilanjutkan sampai tahun 2017. Dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan tentunya dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan agar kegiatan pemberdayaan itu berlangsung dengan lancar. Berdasarkan pencapaian program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat yang telah selesai dilaksanakan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat proses pelaksanaan program sekaligus melihat penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam kegiatan tersebut, yakni dari KK rentan menjadi KK tangguh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan, dan 2) persepsi KK rentan tentang penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Informan penelitian yang digunakan ada 2, yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan pelaku (*responden*). Responden dipilih secara sengaja berdasarkan kemudahan akses dan kesediannya.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Dalam konteks masyarakat, keberdayaan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang belum mampu lepas dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto dan Soebiato, 2015:40).

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya agar masyarakat semakin mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas, yaitu penguatan kemampuan setiap individu, kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok organisasi sosial, serta pihak lain diluar sistem masyarakat sampai di aras global (Mardikanto dan Soebiato, 2015:69).

Pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip tertentu. Matheus dalam Soetomo (2011:105) menyatakan bahwa "prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan kegiatan secara konsisten". Prinsip akan berlaku umum, diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan begitu, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar dalam pelaksanaan program sehingga fasilitator dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

C. Kegiatan Pemberdayaan Kepala Keluarga (KK) Rentan Pada Program *Deepening Resilience*

Program memperkuat ketangguhan masyarakat (*Deepening Resilience*) merupakan suatu program yang dipelopori oleh NGO internasional, yaitu OXFAM dan *Australian Aid*, yang kemudian bekerja sama dengan LSM Jemari Sakato. Program ini bertujuan untuk penurunan korban jiwa dan dampak pada mata pencaharian di daerah berisiko gempa dan tsunami di Kabupaten Agam melalui peningkatan kapasitas bertahan dan adaptasi masyarakat, meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan pemerintah, dan meningkatkan strategi adaptasi dari usaha kecil dan menengah. Sedangkan secara khusus di tingkat komunitas, program ini bertujuan untuk memberikan pilihan bagi rumah tangga dan masyarakat yang rentan dalam meningkatkan kapasitas bertahan dan adaptasi serta mengurangi faktor-faktor yang mendasari kerentanan mereka di 5 jorong di Kabupaten Agam pada Juni 2017 (Jemari Sakato, 2016).

Pemberdayaan KK rentan merupakan bagian dari program *Deepening Resilience* di tingkat komunitas yang dimulai sejak tahun 2015..kegiatan ini berupaya untuk memberikan pilihan kepada rumah tangga rentan dan masyarakat untuk meningkatkan *copmg* dan

kapasitas adaptasi mereka untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan mereka, dengan melakukan kegiatan utama seperti pengkajian terhadap kondisi mata pencaharian keluarga, penyusunan rencana aksi ketangguhan mata pencaharian keluarga, penguatan kelompok siaga bencana, kampanye rumah aman gempa, dan pengembangan bank makanan. upaya-upaya tersebut juga disesuaikan dengan indikator kemiskinan yang menjadi acuan untuk menentukan KK rentan yang akan diberdayakan. Sementara itu, pendampingan intensif dilakukan dalam rencana aksi ketangguhan mata pencaharian keluarga sehingga masyarakat diharapkan dapat mandiri secara ekonomi (tangguh) (Jemari Sakato, 2016).

D. Penerapan Prinsip Pemberdayaan pada Proses Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kepala Keluarga (KK) Rentan dalam Program *Deepening Resilience*

Tabel 1. Indikator Kerentanan

1	Kondisi lokasi tempat tinggal (rumah)	tingkat kerawanan/risiko lokasi terhadap ancaman bencana
		kondisi akses jalur evakuasi
		daya tampung rumah untuk semua anggota keluarga
		kondisi fisik bangunan
		standar kesehatan rumah
		tingkat isolasi lokasi
2	Kondisi sosial budaya	aksesibilitas pengambilan keputusan ditingkat jorong
		akses terhadap bantuan dari pemerintah/lembaga lain
		keikutsertaan dalam anggota kelompok usaha
3	Kondisi mata pencaharian	sumber pendapatan keluarga ketergantungan pada alam atau tidak
		kemampuan pendapatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer keluarga
		akses terhadap sumber keuangan
4	Kondisi kesehatan	gangguan kesehatan yang dialami keluarga
		akses pelayanan kesehatan
		jaminan kesehatan
5	Keahlian dalam pengembangan mata pencaharian	keahlian yang dimiliki
		tingkat produktivitas
6	Aset dan penguasaan alat-alat produksi	aset yang dimiliki
		penguasaan terhadap alat-alat produksi
7	Tanggungan	jumlah tanggungan

Dari program ini diharapkan KK rentan (yang dipilih berdasarkan indikator kerentanan) akan berubah menjadi KK tangguh. KK tangguh ditetapkan dengan indikator KK tangguh. Untuk mewujudkannya dilakukan kegiatan pemberdayaan terhadap KK rentan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan agar kegiatan pemberdayaan berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga KK rentan mengalami peningkatan dan dapat berubah menjadi KK tangguh. Adapun proses yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan tersebut adalah:

1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan diperlukan persiapan yang matang. Tahap persiapan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dengan baik. Tahap persiapan yang dimaksudkan disini adalah persiapan yang dilakukan ditingkat internal LSM Jemari Sakato. Hal yang dilakukannya tidak terlalu banyak. Tujuan dilakukannya persiapan adalah untuk penyusunan strategi implementasi kegiatan yang digunakan sebagai panduan yang jelas dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan *output* yang diharapkan. Pihak yang terlibat dalam tahap persiapan adalah tim Jemari Sakato (fasilitator), pihak OXFAM dan *Australian Aid*.

Kegiatan pemberdayaan KK rentan mulai dipersiapkan setelah 6 bulan program *Deepening Resilience* berlangsung. Tahap persiapan ditingkat internal ini dilakukan di kantor LSM Jemari Sakato. Tepatnya pada Bulan April tahun 2015 kegiatan ini mulai dilaksanakan. Pada tahapan ini masyarakat belum terlibat. Dilihat dari penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan, dalam tahap persiapan ini, LSM Jemari Sakato belum menerapkan secara utuh 4 prinsip yang dilihat. Hal ini karena untuk kegiatan pemberdayaan sendiri belum dimulai, hanya sampai pada penyamaan persepsi dan tujuan program di tingkat internal pelaksana program.

2. Tahap Pelaksanaan

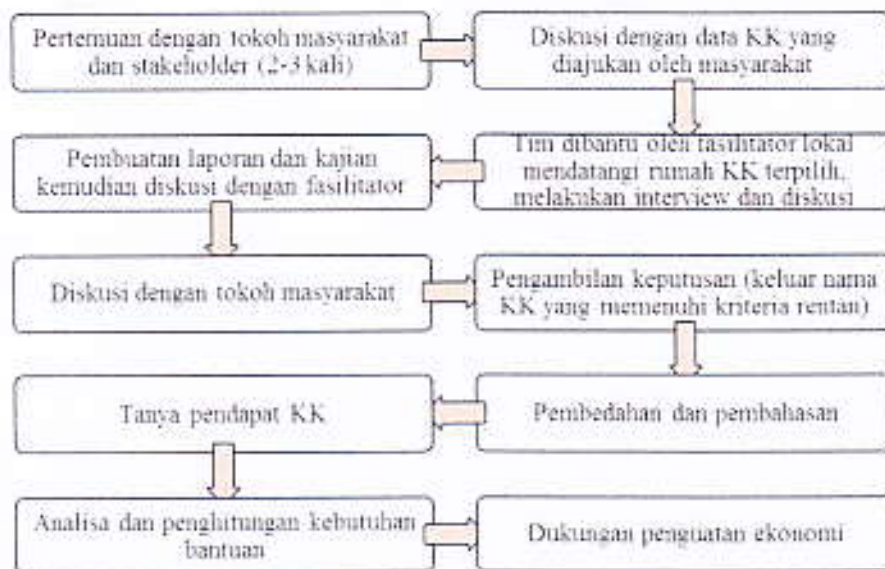
Pelaksanaan program merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan program. Dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan ini terdapat beberapa tahap. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan *workplan* dan *budget plan* yang telah disesuaikan. Dalam pelaksanaannya Jemari Sakato menggunakan metode fasilitas efektif dalam setiap kegiatan serta melibatkan seluruh *stakeholder* terkait secara partisipatif sesuai

dengan kegiatan. Apapun yang menjadi *output* dalam setiap kegiatan merupakan musyawarah dan kesepakatan bersama, termasuk kesepakatan dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardikanto dan Soebito (2012:61) menyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu dalam pembangunan.

Dilihat dari penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan, tahap pelaksanaan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pada tahap ini kegiatan pemberdayaan benar-benar dimulai. Prinsip kesukarelaan diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak tanpa adanya pemaksaan. Sebagai penggerak program, fasilitator hanya mengurus perizinan dan menyebarkan undangan kegiatan. Prinsip partisipatif diterapkan dengan keterlibatan semua stakeholders dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan. Masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu, selain fasilitator, tahap pelaksanaan juga selalu melibatkan pihak nagari dan mitra program. Selanjutnya, prinsip keswadayaan dapat dilihat dari kemampuan masyarakat/KK rentan dalam perumusan kegiatan usaha mata pencariannya sendiri, peningkatan pendapatan usaha dan kebiasaan menabung sementara LSM hanya mendampingi. Melalui kerjasama dengan BPR setempat, KK rentan bisa memiliki tabungan sesuai kemampuannya. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan telah melibatkan banyak pihak yang saling bekerja sama. Tahap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini dilakukan pula melalui beberapa tahap.

a) Tahap Pengkajian Kondisi Masyarakat secara Partisipatif

Tahap pengkajian kondisi masyarakat yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya



Gambar 1. Tahapan Pengkajian Partisipatif

b) Penyusunan Prioritas Rencana Aksi

Penyusunan rencana aksi merupakan tahapan perencanaan bersama KK rentan. Rencana aksi ini muncul untuk menjawab hasil analisis masalah, tujuan dan stakeholder yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan penyusunan rencana aksi adalah untuk memastikan jenis mata pencarian yang didukung nantinya tepat sasaran dan memberikan manfaat secara cepat.

Kegiatan pemberdayaan bersifat *bottom up* yang melibatkan peran masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi berbagai bidang yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan (Azwar, 2014). Dengan penyusunan rencana aksi, KK rentan akan dibantu untuk mendeskripsikan keinginannya dan kemudian didukung sesuai dengan aspirasinya. Prinsip partisipatif diterapkan dalam tahap ini dengan melibatkan KK rentan dalam perencanaan aksi. Bentuk partisipasi KK rentan adalah dengan menyuarakan pendapatnya. Pengambilan keputusan tentang aksi yang akan dilakukanpun tidak menyingkirkan orang-orang tertentu.

Setelah pengkajian lebih lanjut, KK rentan akan memulai aksi pengembangan mata pencariannya dengan dukungan yang sesuai dengan usaha yang dilakukan. Pelatihan dan pengembangan KK rentan dilakukan secara rutin.

Tabel 1. Rencana Aksi Pengembangan Usaha Keluarga

No	Jenis rencana aksi	Jumlah KK
1	Pengembangan usaha ternak (ayam, kambing dan itik, budidaya lele)	18
2	Usaha dagang harian	21
3	Dukungan mata pencarian nelayan	1
	Jumlah	40

Sumber: Dokumen Jemari Sakato 2015

c) Penguatan Ketangguhan Mata Pencarian Keluarga

Penguatan ketangguhan mata pencarian keluarga merupakan tahanan puncak dari kegiatan pemberdayaan ini. Setiap KK rentan diberikan dukungan mata pencarian, kemudian didukung dengan berbagai pelatihan dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya. Masing-masing KK rentan hanya diberikan bantuan atau dukungan mata pencarian berupa materil sebanyak satu kali sebagai modal awal KK untuk menjalankan usaha mata pencariannya. Selanjutnya, pelatihan diberikan secara umum untuk keseluruhan KK rentan dan ada juga pelatihan yang diberikan berdasarkan kelompok usaha. Dengan begitu masing-masing KK mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelatihan dan pertemuan dilakukan secara rutin tiap bulannya yang bertempat di mesjid jorong atau di kantor wali nagari. Hal ini dilakukan hingga program berakhir pada tahun 2017.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendukung ketangguhan KK rentan, yaitu: update pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas mata pencaharian masyarakat secara partisipatif (*Participatory Vulnerability Capacity Aseessment*), update penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi masyarakat serta penguatan ketangguhan mata pencarian masyarakat dalam bentuk pelatihan manajemen keuangan, pelatihan manajemen usaha serta dukungan terhadap rencana keberlanjutan mata pencaharian.

KK rentan diberdayakan sesuai jenis usahanya. Pelatihan dan *sharing* mengenai segala hal tentang pengelolaan ternak bagi KK rentan yang berusaha ternak dan pelatihan manajemen usaha bagi kelompok KK rentan yang memilih untuk berdagang. Apabila terjadi suatu kendala maka akan dicarikan solusi bersama. Selain kegiatan pemberdayaan masyarakat, tim LSM Jemari Sakato juga mencarikan jaringan atau mitra baru yang bisa mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari sini dapat dilihat adanya sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak yang menunjukkan adanya prinsip kebersamaan. Soedijanto (2001) dalam Mardikanto dan Soebito (2015:108), prinsip kebersamaan merupakan kebersamaan dan saling berbagi rasa dan pengalaman, saling membantu dan saling mengembangkan sinergisme.

Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan tidak hanya dilakukan berkaitan dengan jenis usaha masing-masing KK rentan. Akan tetapi juga ada kegiatan pendukung yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Seperti pelatihan keterampilan dan adanya bantuan bibit yang tujuannya untuk mengarahkan KK rentan agar memiliki kebun sendiri di sekitaran rumahnya.

Berbagai upaya peningkatan kapasitas KK rentan dilakukan secara rutin dan berdasarkan kebutuhan. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan KK rentan untuk merumuskan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu ataupun mengharapkan dukungan pihak lain (Soedijanto (2001) dalam Mardikanto dan Soebito (2015:108). Artinya, dalam kegiatan pemberdayaan ini sudah menerapkan prinsip keswadayaan. Selain itu, dengan adanya partisipasi KK rentan dalam kegiatan pemberdayaan secara rutin dan tanpa adanya paksaan membuktikan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan ini juga menerapkan prinsip kesukarelaan dan prinsip partisipatif, yang didukung dengan keterlibatan berbagai pihak yang saling bersinergi (penerapan prinsip kebersamaan).

3. Pelaporan dan monitoring

Pelaporan dan monitoring merupakan tahapan yang menjadi pengukur tercapainya suatu tujuan. Dalam program pemberdayaan KK rentan, setiap suatu kegiatan selesai dilaksanakan akan selalu dibuatkan laporan kegiatannya. Dengan adanya laporan dan monitoring (evaluasi) maka setiap masalah dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan akan dapat ditangani dan dicarikan solusi. Selain itu juga dapat diketahui

sejauh mana pencapaian yang diraih selama pelaksanaan kegiatan. Menurut Mardikanti dan Soebito (2012:264), evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering disebut sebagai padanan istilah "penilaian" yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu objek, keadaan, peristiwa, atau keadaan tertentu yang diamati.

Penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan juga dilakukan pada tahap pelaporan dan monitoring. Prinsip kesukarelaan dan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Selanjutnya, prinsip keswadayaan diterapkan dengan menjadikan masyarakat/ KK rentan bisa melakukan usahanya sendiri dan memiliki pekerjaan tetap untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Sementara prinsip kebersamaan diterapkan dengan menjadikan KK rentan mampu terlibat dalam kegiatan sosial serta mengetahui perkembangan KK lainnya. Selain itu, setiap pertemuan dan pelatihan yang dilakukan, selalu melibatkan berbagai pihak secara bersama, dan KK sendiri juga dituntut untuk saling berbagi.

Dalam pelaporan dan monitoring, pihak yang dilibatkan adalah KK rentan, fasilitator (dari Jemari Sakato dan nagari), dan pihak pemerintah nagari. KK rentan memberikan pelaporan dan informasi usahanya, kemudian dirangkum dan dikumpulkan oleh fasilitator. Pemerintah nagari ikut berperan dalam memberikan dukungan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemberdayaan maupun saat evaluasi.

Perkembangan masing-masing KK rentan tidak sama. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya kegigihan yang dimiliki oleh KK dalam manajemen usaha. Jika dilihat dari kategori KK yang sudah dikelompokkan, maka perkembangan KK (termasuk 4 KK rentan disabilitas yang diberdayakan) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kategori Perkembangan KK 2015-2017

No	Kategori	Jumlah 2015	Tahun 2016	Jumlah 2017
1	Berkembang	-	-	14
2	Sedang berkembang	-	-	20
3	Kurang berkembang	40	36	6
	Jumlah	40	36	40

Sumber: Data Sekunder Jemari Sakato

Dalam setiap proses kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tentunya terdapat beberapa tantangan, hambatan dan pembelajaran yang didapatkan. Hambatan dan tantangan yang ditemui antara lain: (1) efisiensi penggunaan waktu dan implementasi rencana aksi belum mencukupi sesuai dengan yang ada dalam *workplan* program; (2) kondisi dan luasnya lokasi program kurang sebanding dengan jumlah sumberdaya (fasilitator) yang digunakan dalam membantu pencapaian program; dan (3) tidak semua KK bisa di intervensi dengan pemberian bantuan usaha secara langsung, khususnya KK yang masuk ke dalam kategori kurang berkembang. Masalah sosial yang sangat kompleks dari semua sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menjadi faktor penghambat KK untuk berkembang menjadi KK tangguh. Pembelajaran yang didapatkan dari program ini, KK rentan memiliki karakteristik yang bertingkat mulai dari perilaku, cara berfikir, dan faktor-faktor lingkungan yang turut mempengaruhi mereka dalam membangun ketangguhan.

Untuk penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam setiap proses pemberdayaan KK rentan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan dalam Proses Pemberdayaan KK Rentan

No	Proses Pemberdayaan	prinsip			
		Kesukarelaan	Partisipatif	Keswadayaan	Kebersamaan
1	Persiapan	-	-	-	-
2	pelaksanaan (pengkajian kondisi masyarakat, penyesuaian RAK, dan penguatan ketangguhan mata pencarian)	√	√	√	√
3	Pelaporan dan monitoring	√	√	√	√

Menurut Tim Delivery (2004) dalam Mardikanto dan Soebito (2015:125), tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari: (1) seleksi lokasi; (2) sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; (3) proses pemberdayaan (yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: kajian keadaan pedesaan partisipatif, pengembangan kelompok, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi); dan (4) tahapan pemandirian msyarakat. Pada kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh LSM Jemari Sakato, tahapan persiapan program dilakukan pada tingkat internal dan belum melibatkan masyarakat yang dilanjutkan dengan sosialisasi program kepada tokoh masyarakat. Kemudian, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan 3 tahapan yaitu: (1) pengkajian kondisi masyarakat yang dilakukn secara partisipatif; (2) penyusunan RAK (Rencana Aksi Keluarga); dan (3) penguatan ketangguhan mata pencarian. Tahapan pelaporan dan monitoring juga dilakukan selama proses pemberdayaan hingga kegiatan pemberdayaan itu berakhir. Selanjutnya masuk pada tahapan pemandirian masyarakat dimana KK rentan telah mengalami peningkatan menjadi KK tangguh dan dilepaskan dari program pemberdayaan.

Berdasarkan rangakaian tahapan dan proses kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Jemari Sakato ini, dapat dilihat bahwa dari dimulainya proses pemberdayaan hingga pemberdayaan itu selesai, prinsip-prinsip pemberdayaan telah diterapkan. KK rentan telah berpartisipasi dengan baik selama program berlangsung dan menggambarkan bahwa juga ada kesukarelaan dari KK rentan karena tak ada unsur paksaan dalam setiap kegiatan. Prinsip keswadayaan ditujukan agar KK yang diberdayakan diarahkan agar bisa berdaya dan mengambil keputusan sendiri. Masing-masing KK didampingi sehingga mereka mempunyai perencanaan usaha sendiri (dalam hal ini disebut LCP) dan telah berinisiatif memiliki usaha cadangan atau usaha baru. Selanjutnya, prinsip kebersamaan dilakukan dengan adanya sinergi dan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam setiap rangkaian kegiatan. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya penilaian unsur kepedulian sosial yang dimiliki oleh setiap KK sebagai salah satu indikator ketangguhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, berdasarkan data sekunder Jemari Sakato, dapat diketahui bahwa *outcome* yang dicapai adalah kegiatan ini telah mampu meningkatkan kehidupan masyarakat dari kondisi rentan kepada kondisi tangguh dengan total 85% KK rentan yang diberdayakan telah mengalami peningkatan dari sebelumnya.

E. Persepsi Responden tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Dalam penelitian ini, ada beberapa prinsip yang dinilai tentang penerapannya selama program dilaksanakan. Pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* ini diamati berdasarkan empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Soedijanto (2001) dalam Mardikanto dan Soebito (2015:108). Berdasarkan wawancara dengan 13 responden, penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

No	Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	Total Jawaban responden	Total Jawaban	Persentase (%)	Kriteria
1	Prinsip Kesukarelaan	49	52	94,23	terpenuhi
2	Prinsip Partisipasi	75	78	96,15	terpenuhi
3	Prinsip Keswadayaan	43	52	82,69	terpenuhi
4	Prinsip Kebersamaan	45	65	69,23	terpenuhi
	Jumlah	212	260	85,58	terpenuhi

Sumber: Data primer olahan 2018

Tabel diatas menunjukkan rata-rata penerapan prinsip pemberdayaan sebesar 85,58% dengan kriteria terpenuhi. Artinya, penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh LSM Jemari Sakato sudah diterapkan dengan baik. Prinsip kesukarelaan diterapkan sebesar 94,23%, prinsip partisipatif sebesar 96,15% prinsip keswadayaan sebesar 82,69%, dan prinsip kebersamaan diterapkan sebesar 69,23%. Dari 4 prinsip yang dilihat, prinsip partisipatif diterapkan dengan persentase paling tinggi. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh Jemari Sakato sangat tinggi. Setiap diadakan pertemuan, responden mengakui bahwa mereka akan datang, kecuali pada kondisi yang mendesak. Sebelum pertemuan diadakan, masing-masing KK akan diberikan undangan secara resmi. Hal ini menjadi dorongan tersendiri bagi KK rentan karena merasa dihargai. Pada setiap pertemuan dan pelatihan, KK terlibat

langsung melalui diskusi bersama dan saling berbagi informasi secara aktif. Selain itu, setiap KK rentan memiliki hubungan dan komunikasi yang terjalin baik dengan fasilitator. Sementara itu, prinsip kebersamaan berada pada persentase paling rendah dari prinsip yang lain. Hal ini terjadi karena KK yang diberdayakan belum memiliki inisiatif yang tinggi untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan usahanya.

Menurut Dusseldrop (1981 dalam Mardikanto dan Soebito (2015:85) ada beragam bentuk partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat, yaitu: (1) menjadi anggota kelompok masyarakat; (2) melibatkan diri dalam diskusi kelompok; (3) melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat; (4) menggerakkan sumberdaya masyarakat; (5) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; dan (6) memanfaatkan hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh LSM Jemari Sakato ini, masing-masing pihak berpartisipasi dalam bentuk-bentuk partisipasinya. KK rentan selaku penerima manfaat program bergabung dalam kelompok keluarga rentan berdasarkan jenis mata pencarian yang didukung untuk memudahkan proses pendampingan. Setiap acara pertemuan rutin kelompok maka masing-masing KK akan berdiskusi untuk mengevaluasi kendala dalam usahanya dan kemudian mencari solusi bersama. KK rentan tidak hanya ikut hadir di setiap kegiatan tapi juga diberikan kesempatan dan ikut mengambil keputusan.

Inti dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah adanya proses belajar yang mandiri untuk terus-menerus melakukan perubahan (Mardikanto dan Soebito, 2015:68). Dalam proses pemberdayaan KK rentan, pendampingan dilakukan dengan intensif, namun peran fasilitator terus berkurang seiring dengan berjalannya program. Di awal program, fasilitator lokal maupun fasilitator LSM lebih banyak mencari mitra atau *stakeholders* yang bisa mendukung terwujudnya keswadayaan masyarakat.

Dari 4 prinsip yang dilihat, prinsip partisipatif diterapkan dengan persentase paling tinggi. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh Jemari Sakato sangat tinggi. Setiap diadakan pertemuan, responden mengakui bahwa mereka akan datang, kecuali pada kondisi yang mendesak. Sebelum pertemuan diadakan, masing-masing KK akan diberikan undangan secara resmi. Hal ini menjadi dorongan

tersendiri bagi KK rentan karena merasa dihargai. Pada setiap pertemuan dan pelatihan, KK terlibat langsung melalui diskusi bersama dan saling berbagi informasi secara aktif. Selain itu, setiap KK rentan memiliki hubungan dan komunikasi yang terjalin baik dengan fasilitator. Sementara itu, prinsip kebersamaan berada pada persentase paling rendah dari prinsip yang lain. Hal ini terjadi karena KK yang diberdayakan belum memiliki inisiatif yang tinggi untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan usahanya.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan Kabupaten Tanjung Mutiara yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan sudah dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, dan diakhir kegiatan telah menjadikan 85% KK mengalami peningkatan taraf kehidupan dari KK rentan menjadi KK tangguh.
2. Persepsi KK rentan tentang penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan ini sudah memenuhi penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan, dengan rata-rata persentase sebesar 85,58% prinsip terpenuhi. Prinsip-prinsip pemberdayaan tersebut terdiri dari prinsip kesukarelaan terpenuhi 94,23%, prinsip partisipatif terpenuhi dengan persentase paling besar yaitu 96,15%, prinsip keswadayaan terpenuhi 82,69% dan prinsip kebersamaan dengan persentase yang paling kecil dibandingkan dengan prinsip lainnya yaitu 69,23%.

Selanjutnya, dari penelitian ini disarankan:

1. Untuk kedepannya diharapkan kegiatan pemberdayaan ini bisa *sustainable* dan dilanjutkan oleh nagari dan masyarakat penerima manfaat juga menjaga keberlanjutan program.

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode yang berbeda dan atau melakukan pengkajian topik lainnya dari program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza.2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, dkk. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295. Universitas Brawijaya.
- Azwar, Budi.2014. *Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis)*. Jurnal Kewirausahaan, Vol 13, No.1, Januari- Juni 2014
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. Kecamatan Tanjung Mutiara dalam Angka 2017. <https://agamkab.bps.go.id> 17 April 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. Statistik Daerah Kabupaten Agam 2017. <https://agamkab.bps.go.id> 1 Januari 2019
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. Statistik Pertanian Kabupaten Agam 2016: Edisi Tanaman Pangan. <https://agamkab.bps.go.id> 1 Januari 2019
- Bungin, Burhan.2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Rajawali Pers: Jakarta.303 hal.
- Dartanto.2014. *Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo*. Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 Jurnal Administrasi Pendidikan Hal.108 - 831.
- Fakih, Mansour.1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*. Yogyakarta: Puataka Belajar.
- Final Report* Program Memperkuat Ketangguhan masyarakat. Jemari Sakato. 2016

- Girsang, Wardis.2009. *Strategi Pengentasan Kemiskinan di Pulau Kecil di Provinsi Maluku*. Universitas Pattimura. Jurnal Agrikultura 2009, 20(3):176-189.
- Hikmat, Harry.2014. *Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat (People Centred Development)*. Andalsos: Staf Ahli bidang Dampak Sosial Kemensos.
- Hermantyo, A Irawati. 2008. *Pengalaman Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin Di Sektor Pertanian (Sebuah Refleksi)* [Abstrak]. Hal 81. Jakarta Pusat: PT. Bina Swadaya Konsultant
- Ife, jim dan Frank Tesoriero.2008.*Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 721 hal.
- Kurnianingsih, Titik.2013. *Dimensi Kemiskinan*. Biro Analisa Penganggaran dan Pelaksanaan APBN.
- LIPi & BI. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Kerja sama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dengan Bank Indonesia.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato.2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 341 hal.
- _____.2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 280 hal.
- Nanga, Muana. 2000. *Mencermati Pergeseran Paradigma dalam Pembangunan*. Meditech Vol. 8, No.21, Jantnri - April 2000. hal:67-79
- Nasdian, Fredian Tonny.2014. *Pengembangan Masyarakat*. Bogor: yayasan Pustaka Obor. 317 hal.
- Nikijuluw, Victor P.H.2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Hotel Permata, Bogor, 29 Oktober 2011
- Nugroho, Rino A. 2007. *Pengantar Teori Pembangunan*. Ver 1.1 Updated 020307
- Pasaribu, Ali Musa.2012. *Perencanaan & Evaluasi Proyek Agribisnis (Konsep & Aplikasi)*.Lily Publisher. Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus.2007. *Mengkaji potensi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 1.410-4946 Volume 10, Nomor 3, Maret 2007 (295-324). UGM

- Reni, A. 2012. *Pola Pendampingan LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis HAM*. [Skripsi]. Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. 174 hal.
- Rifa'i, Bachtiar. 2013. *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. universitas Airlangga. Jurnal. Volume 1, Nomor 1, Januari 2013. ISSN2303-341X
- Rukminto Adi, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas. Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. 410 hal.
- Singarimbun, et al. 1987. *Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi*. Pustaka LP3S Indonesia: Jakarta.
- Soetomo.2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 280 hal.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 334 hal.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 334 hal.
- Suharto, Edi.2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Sukino.2013. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani: Terobosan Menanggulangi Kemiskinan*. Yogyakarta.Pustaka baru Press
- Supriyanto.2006. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan , Volume 3 Nomor 1, April 2006
- Supriyanto ,dkk.*Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. 32 hal.
- Surakhmad, winarno.2000 *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung:Tarsito.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Zubaedi.2007.*Wacana Pembangunan Alternatif.Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Arruz Media Group. 310 hal.